

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- A.Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berasas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaan*, Jakarta : Djamban, 2003.
- Chandra Fajri Ananda, dkk, *Analisa Dampak Pengalihan Pemungutan BPHTB ke Daerah Terhadap Kondisi Fiskal Daerah*, Jakarta : Dirjen Kementrian Bidang Bidang Desentralisasi Fiskal, 2012
- Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, Eresco : Bandung, 1993
- Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia*, , Jakarta : Mitra wacana Media ,2012.
- H. Bohari, SH., MS, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : PT, RajaGrafindo, 2014
- Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : Rajawali Pers. 2002.
- Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, Jakarta : PPS Fisip UI, 2002.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Bandung* : CitraAditya Bakti, 2006,
- Indrohato, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2010

- I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislatif Drafting, Seri Naskah Akademik Pembentukannya*, Yogyakarta : Total Media, 2011.
- Koesoemahatmadja, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung : Percetakan Ekonomi, 1979.
- Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, Jakarta : Paja Grafindo Persada, 2003
- M. Akil Mochtar, *kewenangan pusat dan daerah dalam pembangunan daerah di daerah otonomi*, 2010,
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Pres , 2003
- Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco: Bandung, 1990
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty , 1997
- Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012
- Soerjono soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Dan Politik Agrarian*, Universitas Terbuka: Jakarta, 1988.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya : Fakultas Hukum Unair, 1998
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta : Kencana, 2010

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 4*, Jakarta : Salemba Empat 2010

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : ON Balai Pustaka, , 1984.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat,: Jakarta, 1999

2. TESIS

Eka Yulianti Alwi, *Penentuan Harga Jual Beli Tanah Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Pekanbaru*, Tesis Universitas Andalas, tahun 2018

Vista Anggarda Paramita, *Penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Transaksi Jual Beli oleh Pemerintah Kota Padang*, Tesis Universitas Andalas, Magister Kenotariatan, thn. 2015

Zainal Rajab, *Penentuan Harga Tanah Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota*, Tesis Universitas Andalas, Magister Kenotariatan, thn. 2014

Roni Ermanto, *Penentuan Harga Tanah Sebagai Dasar Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Pekanbaru*, Tesis Universitas Andalas, tahun. 2014.



3. UNDANG UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena Waris dan Hibah Wasiat.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tanah di Kota Pariaman.

4. WEBSITE

<https://www.online-pajak.com/teori-pemungutan-pajak> diakses pada tanggal 28 Februari 2019

